



Analisis Kebijakan Perubahan Stain/IAIN Menjadi UIN

Ahmad Hafizon¹, Hairunnas Rajab²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
e-mail: ahmadhavizon@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis kebijakan perubahan STAIN/IAIN menjadi UIN. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang melatarbelakangi perlunya konversi IAIN menjadi UIN yaitu perubahan pada jenis pendidikan Madrasah Aliyah. Dulunya Madrasah adalah sekolah agama, kini madrasah sudah menjadi bagian dari sekolah umum atau sekolah yang berciri khas Islam, Adanya dikotomi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Perubahan IAIN menjadi UIN merupakan peluang bagi para lulusan untuk memasuki lapangan kerja yang lebih luas. Perubahan IAIN menjadi UIN adalah dalam rangka memberikan peluang bagi lulusan IAIN untk melakukan mobilitas vertical, dan perubahan IAIN menjadi UIN juga merupakan tuntutan akan penyelenggaraan pendidikan yang professional, berkualitas tinggi dan menawarkan banyak pilihan.

Kata Kunci: *Analisis, Kebijakan, Perubahan, STAIN, UIN*

Abstract

The purpose of this study was to determine the policy analysis of changing STAIN /IAIN to UIN. This study used the library research method. The results showed that there were several reasons behind the need for the conversion of IAIN to UIN, namely changes in the type of Madrasah Aliyah education. Formerly Madrasahs were religious schools, now Madrasahs have become part of public schools or schools with Islamic characteristics, There is a dichotomy between religious sciences and general sciences. The change from IAIN to UIN is an opportunity for graduates to enter more employment opportunities. The change from IAIN to UIN is in the context of providing opportunities for IAIN graduates to carry out vertical mobility, and the change from IAIN to UIN is also a demand for the provision of professional, high-quality education and offers many choices.

Keywords: *Content, Formatting, Article*

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi IAIN menjadi UIN tentunya tidak hanya menjadi aspek penting dalam islamisasi ilmu, tetapi juga memberikan peluang yang lebih besar bagi alumni pondok pesantren SMA/Aliyah yang karena faktor ekonomi tidak dapat kemudian melanjutkan pendidikan ke program studi sains. Sebagian besar peminat studi di UIN atau IAIN adalah orang-orang yang secara ekonomi menengah ke bawah. Memang, tidak ada survei tentang hal ini. Mendirikan lembaga pendidikan Islam tentunya memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi akademik

dan fungsi dakwah. Dalam fungsi akademik, memperluas spektrum keilmuan berarti memperluas dan memberikan akses kepada anak bangsa untuk menjadi akademisi yang selain memiliki keahlian di bidang studinya juga menjadi da'i. Nur Sam (2022) menyatakan bahwa bukankah sangat ideal, jika ada da'i yang mampu menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an melalui pendekatan akademis, sementara ada juga ahli agama yang berkualifikasi tinggi karena pemahaman agamanya yang lengkap.

Dengan demikian, di satu sisi, para ahli agama yang sangat berkualitas dan juga dihasilkan oleh pakar keilmuan yang memiliki keahlian keilmuan sangat memadai dan sekaligus menjadi ahli agama yang berkomitmen untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Selain menyediakan akses bagi alumni pondok pesantren dan masyarakat lain yang memiliki kemampuan ekonomi sangat terbatas, tetapi memiliki kecenderungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di bidang penelitian yang bervariasi, maka yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan penegasan bidang studi apa dan di mana letaknya.

Dalam sejarah bahwa sekolah tinggi agama islam merupakan upaya pemenuhan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan Islam. Ini tidak hanya ini dianggap sebagai pengakomodir penguasa atas kelompok-kelompok Islam, tapi berharap keberadaan Perguruan Tinggi Islam mampu mengakomodir peran dan keberadaan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Baik itu di perjalanan, perubahan sosial, ekonomi, politik, pemahaman agama, pergeseran nilai dan gaya hidup yang dinamis selalu berkembang. Sampai Pada akhirnya, Sekolah Tinggi Islam perlu meningkatkan dan mengembangkan keterampilan mereka arah yang lebih luas. Misalnya, perubahan institusi dari sekolah tinggi menjadi Universitas Islam Indonesia, kemudian berkembang menjadi fakultas agama ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Kemudian harapan masyarakat lain untuk mendirikan Akademi Ilmu Agama dimana Mahmud Yunus (2008) menjelaskan bahwa kehadiran ADIA adalah untuk mendidik pegawai negeri di lingkungan kementerian agama dan ahli agama.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian perpustakaan adalah pengungkapan argumentatif dari sumber data dalam bentuk studi. Sumber data penelitian ini adalah dalam bentuk buku yang berkaitan dengan kebijakan perubahan STAIN/IAIN menjadi UIN. Sumber lain adalah temuan penelitian, hasil diskusi, seminar, dan sebagainya. Bahan pustaka kemudian dibahas dan dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan gagasan yang ada dari berbagai referensi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, pencarian data atau teori yang relevan dengan pertanyaan penelitian, yaitu; bagaimana kebijakan perubahan STAIN/IAIN menjadi UIN dalam bentuk buku, laporan temuan penelitian, artikel ilmiah, jurnal dan sebagainya. Setelah data terkumpul maka data dianalisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis konten dan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Perubahan Status Perguruan Tinggi IAIN Menjadi UIN

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- g. Keputusan Menteri Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;

Sejarah singkat dan tantangan menuju UIN

Dalam sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia bahwa perguruan tinggi yang secara resmi didirikan sejak 1960, oleh tokoh moderat KH. Wahid Hasyim dimaksudkan sebagai wahana umat menempa ilmu pengetahuan yang lebih tinggi. Sebagai seorang tokoh muslim yang tidak diragukan kecendekiannya, pengaruh Wahid Hasyim tidak hanya terlihat dalam pendirian IAIN di seluruh Indonesia. Tetapi, ia juga tokoh yang terlibat dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang melindungi berbagai paham dan suku bangsa. Dari informasi tersebut dapat dipahami bahwa akselerasi berfikir para tokoh-tokoh Islam sangat cemerlang dan berillan guna memajukan pendidikan di Indonesia.

IAIN/STAIN bukanlah bentuk kelembagaan final dalam perkembangan kelembagaan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Pada awal sejarahnya, IAIN sendiri memiliki beberapa nama seperti PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) yang diambil dari Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950. Ketika itu PTAIN memiliki jurusan Da'wah (kelak Ushuluddin), Qodlo (kelak menjadi Syari'ah), dan Pendidikan (Tarbiyah). Pada tanggal 26 September 1951 nama tersebut berubah lagi menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Enam tahun kemudian, 14 Agustus 1957, di Jakarta berdiri pula Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957.

Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan umat Islam terhadap pendidikan tinggi agama Islam, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dikeluarkan. Menurut dokumen

ini, penggabungan PTAIN dan ADIA menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "*Al-Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah*" yang berkedudukan di Yogyakarta menjadi kenyataan. Pada 24 Agustus 1960 nama IAIN kemudian diresmikan di Yogyakarta oleh K.H. Wahid Hasyim. Demikianlah perguruan tinggi Islam Indonesia terus berubah sebagai respons atas perkembangan masyarakat dan sekaligus menanamkan nilai-nilai agama pada setiap peserta didiknya.

Dalam perjalanan panjang selama 49 tahun STAIN/ IAIN/ UIN di Indonesia ini telah banyak menghasilkan lulusan baik pada strata satu, begitu juga pada strata dua dan tiga. IAIN tumbuh dan berkembang sejak beberapa dasawarsa yang lalu, dan telah menunjukkan keberadaannya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Hasilnya telah banyak alumninya yang berkiprah di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Hal tersebut bahkan politikus, dan lain sebagainya adalah merupakan profesi alumni PTAIN.

Perubahan status IAIN/ STAIN menjadi UIN, menurut Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawwar pada waktu itu, membawa berbagai implikasi dan tantangan cukup besar. Karena itu, Menteri Agama menyerukan agar segera berusaha mengkaji dan mencari solusinya. Muhammadiyah Amin menatakan bahwa dibutuhkan perjuangan dari Mendiknas dan kerja keras para pejabat eselon I di lingkungan Depdiknas dan Depag dalam rangka mewujudkan sebuah lembaga akademik yang bercitra dan memiliki kepercayaan kuat dari masyarakat.

Selain itu, perubahan ini dimaksudkan agar UIN bisa mengembangkan disiplin ilmu-ilmu lain yang bersifat universal tanpa terkungkung pada ilmu-ilmu keagamaan semata. Menurut Muhammad Idris (2008) bahwa perubahan tersebut tentunya didukung dengan perubahan lebih awal dari sisi SDM, administrasi dan pendanaan dan pengembangan kelembagaan. Diharapkan UIN bisa memberikan wacana dan wawasan keberagaman yang betul-betul membumi pada setiap bidang keilmuan.

Orientasi seperti inilah yang mesti dilakukan oleh UIN di masa depan untuk membangun ilmu pengetahuan yang berkeadaban dengan memasukkan ilmu-ilmu keagamaan pada setiap bidang keilmuan. Wacana ini, meminjam istilah Ismail Raji Al-Faruqi disebut "Islamisasi ilmu pengetahuan". Relevansi semua ini terlihat ketika melihat wacana keagamaan tidak menyentuh sisi empirik persoalan di masyarakat.

Respons masyarakat terhadap perubahan status STAIN/IAIN menjadi UIN cukup beragam. Sebagian mereka menilai positif karena mahasiswa UIN, nantinya, tidak hanya terdiri dari kalangan muslim santri (pesantren), tetapi juga kalangan muslim non-santri baik yang belajar di SMU, SMK, maupun lainnya. UIN terbuka bagi berbagai elemen masyarakat. Ketika IAIN Syarif Hidayatullah berubah menjadi UIN membuka jurusan umum, terlihat antusiasme masyarakat sangat tinggi. Pada sisi lain penilaian negatif juga muncul seiring dengan pembukaan jurusan umum tersebut. Penilaian tersebut terangkum dalam beberapa poin berikut ini.

Pertama, semakin terkikisnya studi-studi keislaman (*Islamic studies*). Hal ini terlihat dari keluhan dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta karena semakin kecilnya mahasiswa yang menekuni *Islamic studies* seperti filsafat Islam, pendidikan Islam, sejarah dan peradaban Islam, dan lainnya. *Islamic studies* merupakan ciri khas IAIN selama bertahun-tahun. Ia merupakan cikal bakal IAIN untuk mencetak kader-kader *par excellent* seperti Mukti Ali, Harun Nasution, Munawir Sjadzali, Nurcholish Madjid, dan lainnya. Menurutnya, minat mahasiswa terhadap *Islamic studies* karena studi-studi tersebut dianggap tidak menjanjikan masa depan. Sejalan dengan perkembangan zaman, peserta didik memilih jurusan-jurusan umum seperti ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu teknik, ilmu pariwisata, dan lainnya.

Kedua, budaya mahasiswa UIN menjadi sangat beragam. Budaya tersebut tentu saja bersinggungan antara satu dengan lainnya karena akar tradisinya berbeda-beda seperti santri versus non-santri, anak desa versus anak kota. Bahkan, seluruh budaya ini kemudian didialektikakan dengan budaya modern yang *notabene* dibawa oleh negara-negara Barat.

Dalam konteks inilah meminjam istilah para kiai pesantren UIN tak ubahnya rumah sakit yang harus memberikan obat terhadap berbagai penyakit umat. UIN harus menyediakan banyak dana untuk biaya pengobatan berbagai penyakit yang diderita pasien tersebut. Karena itu, UIN harus bisa mengantisipasi munculnya perilaku-perilaku mahasiswa yang tidak mencerminkan almamaternya.

Bila STAIN/IAIN menuju UIN dalam merespon tantangan globalisasi, tampaknya memang sangat relevant mengingat era ini nampak dirasakan saat ini sangat kompetitif, global, dan seringkali penuh nuansa krisis dan keguncangan. Sehingga semua lembaga perlu mengaca diri, sejauhmana ia memiliki kesiapan (konsep, SDM, dan mental) dalam memasuki wilayah globalisasi, otonomisasi dan modernisasi.

Perubahan IAIN menjadi UIN

Sejarah panjang perguruan tinggi Islam di Indonesia, dari masa awal pendirian sekolah tinggi Islam, Universitas Islam Indonesia, kemudian yang tadinya fakultas agama di UII dinaikkan statusnya menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam, diikuti pendirian Akademi Dinas Ilmu Agama sampai pada penyatuan PTAIN dan ADIA menjadi IAIN. Munculnya gagasan perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia yakni transformasi IAIN menjadi UIN. Ada beberapa alasan yang diidentifikasi atas gagasan tersebut. Pertama, dengan bentuk institut, ruang lingkup hanya sebatas keilmuan dan pengkajian keislaman saja. Kedua, wawasan mahasiswa dan dosen IAIN terbatas, berbeda halnya dengan universitas umum. Sehingga pengkajian Islam seolah terputus dari persoalan kontemporer yang aktual. Sehingga menuju transformasi lembaga tersebut menjadi harapan yang harus diwujudkan, agar kedua alasan tersebut dapat diselesaikan.

Gagasan tersebut bukan berarti langsung terwujud, karena tetap saja harus melalui berbagai persyaratan, kesiapan pemenuhan kebutuhan IAIN menjadi UIN

dalam berbagai aspek; misalnya kegiatan akademis akan lebih besar pengelolaannya, lahan yang harus diperluas, kebutuhan tenaga dosen dan pegawai administrasi dan berbagai persiapan lainnya.

Dalam pandangan Azyumardi Azra dalam (Abudin Nata) juga dikatakan (salah satu arsitek penting dalam proyek perubahan IAIN ke UIN) bahwa gagasan dan konsep dasar pengembangan IAIN menuju UIN tak lepas dari beberapa masalah yang dihadapi IAIN dalam perkembangannya selama ini. Pertama, IAIN belum berperan secara optimal dalam dunia akademik, birokrasi dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. IAIN lebih banyak berperan di masyarakat karena dalam konteks dakwah. Kedua, kurikulum IAIN belum mampu merespon perkembangan IPTEK dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks.

Alasan-alasan di atas menjadi bagian dari upaya untuk melakukan perubahan IAIN menjadi UIN, sehingga tidak hanya dominan pada orientasi dakwah akan tetapi juga untuk merespon dan menghadapi masyarakat baru dan semakin kompleks. Dorongan kuat terhadap perubahan ini juga dianggap untuk memperjelas institusi pendidikan Islam, Artinya IAIN dianggap sebagai lembaga dakwah atau lembaga pendidikan tinggi. Seperti halnya disampaikan oleh alm. Prof. Harsya W. Bachtiar (Guru Besar Universitas Indonesia) bahwa agar IAIN mengambil sikap tegas antara sebagai lembaga dakwah atau perguruan tinggi.

Abuddin Nata mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang melatarbelakangi perlunya konversi IAIN menjadi UIN. *Pertama*, perubahan pada jenis pendidikan Madrasah Aliyah. Dulunya Madrasah adalah sekolah agama, kini madrasah sudah menjadi bagian dari sekolah umum atau sekolah yang berciri khas Islam. Di madrasah sudah terdapat mata pelajaran umum yang dimuat dalam kurikulumnya. Misalnya eksakta, sosial, bahasa dan fisika. Ini berbeda dengan kondisi IAIN yang masih menyediakan sekolah agama. Lulusan madrasah akan merasa kesulitan untuk masuk UIN. Di samping itu konversi ini juga untuk menyambut tamatan sekolah menengah umum dapat masuk IAIN apabila telah menjadi UIN, karena dapat menyediakan jurusan dan fakultas umum. Perubahan ini juga merupakan misi untuk pemberdayaan masyarakat/umat di masa depan.

Kedua, adanya dikotomi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Abuddin Nata berpendapat bahwa masalah dikotomi ini solusinya adalah program integrasi ilmu pengetahuan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dengan anggapan bahwa kalau IAIN hanya menyelenggarakan ilmu-ilmu agama. Ini akan melestarikan dikotomi tersebut. Maka dengan ini IAIN harus menjadi UIN untuk dapat mendirikan fakultas fakultas umum.

Ketiga, perubahan IAIN menjadi UIN merupakan peluang bagi para lulusan untuk memasuki lapangan kerja yang lebih luas. Selama ini, arah lulusan IAIN adalah lembaga pendidikan Islam, kegiatan keagamaan, dakwah dan pada tataran departemen agama. Maka dengan perubahan menjadi UIN akan lebih meluas lingkup kerja dan eksistensi lulusan IAIN. Dengan perubahan

menjadi UIN juga sebagai upaya konvergensi ilmu umum dan agama, seperti yang diungkapkan oleh Harun Nasution bahwa perubahan IAIN menjadi universitas dirancang untuk menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan.

Keempat, perubahan IAIN menjadi UIN adalah dalam rangka memberikan peluang bagi lulusan IAIN untuk melakukan mobilitas vertikal. Yakni kesempatan gerak dan peran dan memasuki medan yang lebih luas. Lulusan IAIN akan memasuki wilayah dan lingkungan yang lebih luas, bervariasi dan bergengsi. Perubahan ini juga ingin kembali menaruh harapan umat Islam menjadi pelopor peradaban manusia yang dulu pernah dicapai Islam zaman klasik.

Kelima, perubahan IAIN menjadi UIN juga merupakan tuntutan akan penyelenggaraan pendidikan yang profesional, berkualitas tinggi dan menawarkan banyak pilihan. Apalagi dengan sambutan arus globalisasi yang melahirkan lingkungan persaingan dan kompetisi. Sehingga IAIN dengan menjadi UIN merupakan bagian dari upaya menghadapi tantangan dan menangkap peluang.

Gagasan menuju universitas bukan tidak menghadapi tantangan ataupun pro kontra di kalangan muslim maupun para tokoh Islam. Tantangan permasalahan bukan tidak ada, akan tetapi semenjak ide perubahan lembaga tersebut disuarakan banyak menuai kritikan dan pertanyaan. Menurut Abuddin Nata bahwa ada beberapa permasalahan yang muncul baik itu terkait dengan legal formal, kelembagaan, filosofis, historis, psikologis dan bahkan politis.

Ia menjelaskan bahwa dari segi legalitas, penambahan fakultas-fakultas umum atau non agama akan terbendung dengan PP No. 60 Tahun 1999, ada yang ditekankan dalam peraturan tersebut yakni institut. Institut yang dijelaskan dalam peraturan tersebut adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dalam satu kelompok bidang studi tertentu, seperti kelompok bidang studi agama saja, hukum saja, pertanian saja dan seterusnya. Masalah berikutnya adalah kelembagaan, setelah perubahan IAIN menjadi Universitas apakah kelembagaannya berada di bawah naungan departemen Agama atau berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Persoalan lain yang muncul adalah latar belakang filosofis-historis. Di mana IAIN memiliki akar filosofis visi dakwah dan pengkajian keislaman. Adanya kekhawatiran tokoh Islam akan dihapuskannya hasil perjuangan pendahulu mereka atas IAIN. Sisi lain juga ada masalah yang timbul dengan perubahan IAIN menjadi UIN yakni masalah yang bersifat politik. Di mana berdirinya IAIN tidak terlepas dari bentuk akomodasi dan penghargaan pemerintah atas peran dan kontribusi umat Islam dalam perjuangan bangsa ini.

Beberapa tokoh lain menanggapi secara beragam ketika ide IAIN menjadi UIN. Misalnya saja mantan menteri Agama Munawir Syazali. Menurutnya pendirian IAIN adalah untuk menciptakan sarjana Agama. Maka apabila ada perubahan lembaga, ia tidak tahu apa arah perubahan tersebut. Bila alasan Islamisasi ilmu, bukannya ilmu pengetahuan bersifat netral. Karenanya tidak perlu Islamisasi. Munawir Syazali juga mempertanyakan apakah setelah perubahan

lembaga tersebut menghasilkan output yang semakin baik. Ia juga membandingkan kualitas mahasiswa IAIN juga masih kurang.

Selain itu juga gagasan transformasi tersebut dikomentari senada oleh KH. Ma'ruf Amien (Ketua Syuriah PBNU). Ia juga tidak setuju dengan adanya perubahan IAIN menjadi UIN Menurutnya IAIN tetap saja focus pada pendidikan khusus masalah agama. Lain halnya pendapat yang di sampaikan oleh Din Syamsuddin dan Tutti Alawiyah bahwa IAIN sudah waktunya berubah menjadi UIN, karena untuk menangkap tantangan dan peluang di masa yang akan datang.

Dalam perjalanannya, transformasi perguruan tinggi Islam menjadi Universitas juga tidak dapat dihindari, apalagi setelah berhasilnya IAIN Jakarta dan Jogjakarta menjadi UIN. Disusul dengan IAIN di daerah lain. Seperti UIN Bandung, UIN Malang, UIN Alaudin Makasar.

Perubahan tersebut juga tidak terlepas dari harapan untuk menjawab tantangan dan peluang yang dihadapi perguruan tinggi Islam di Indonesia. Beberapa tanggapan di atas dan permasalahan di atas, setidaknya dapat diatasi apabila setiap IAIN memiliki kesungguhan dan i'tikat baik untuk menjawab perubahan tersebut. Perubahan menjadi UIN adalah salah satunya untuk memperluas peluang dan kesempatan lulusan UIN dalam dunia global. Dalam aspek keilmuan, bahwa sudah pantas kalau perubahan UIN adalah upaya Islamisasi ilmu pengetahuan, integrasi ilmu umum dan agama. Ditambahkan oleh Din Syamsudin bahwa, dengan perubahan menjadi UIN adalah upaya perguruan tinggi Islam dalam mengintegrasikan nilai Islam dan etika dalam ilmu pengetahuan.

KESIMPULAN

Dikembangkannya STAIN/IAIN menuju UIN. Hal tersebut merupakan respons positif dan konstruktif terhadap tantangan dunia pendidikan yang menglobal. Dengan demikian dapat memproduksi alumni-alumni yang memiliki *competitive advantage*, daya saing yang andal dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Perubahan IAIN menjadi UIN, dapat dilihat antara lain diresmikannya UIN Jakarta pada tanggal 08 Juni 2002, (Keppres Nomor 31 tahun 2002), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Keppres Nomor 50 Tahun 2004) dan UIN Malang (Keppres Nomor 50 Tahun 2004). Menyusul kemudian UIN Pekanbaru Riau, UIN Makassar dan UIN Bandung. Semoga STAIN/IAIN lainnya dapat menyusul dengan mempersiapkan SDM yang memadai, sehingga dapat kompetitif dan merekabel dalam mersepon tantangan zaman ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Idris, Muhammad, *Pemberdayaan Kualitas Umat Menuju Masyarakat Madani (Sebuah opsi memasuki masyarakat yang membebaskan)* Tesis PPs. UIN Makassar 2006

Jurnal *Inovasi Pendidikan Tinggi Agama Islam, Perta*, Vol. VII/No. 01/ 2004

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3389 Tahun 2013 Tentang *Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas Dan Jurusan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2013*

Kusmana dan Munadi, Yudi (ed.), *Proses Perubahan IAIN Menjadi UIN Syarif*

- Hidayatullah Jakarta*, (Ciputat: Jakarta UIN Press, 2002)
- Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 2008)
- Muhammadiyah Amin, Makalah yang disampaikan pada *kuliah umum* STAIN Manado tanggal 30 Maret 2009
- Nata, Abuddin (et.al.), *Dari Ciputat, Cairo, Hingga Colombia*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002)
- Nata Abuddin, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. 5
- Nur Sam, "KONVERSI IAIN KE UIN" dalam <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=981> (05 Oktober 2022),